

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
No. DAFTAR: 0233 / PER-UMP / 08
TANGGAL : 29-04-08 .

**ANALISIS PENETAPAN TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI
TERMINAL PADA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI



OLEH :

NAMA : FREDY ARIYANTO

NIM : 22 2003 129

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI
2008**



**ANALISIS PENETAPAN TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI
TERMINAL PADA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



OLEH :

NAMA : FREDY ARIYANTO

NIM : 22 2003 129

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI
2008**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fredy Ariyanto
Nim : 222003129
Jurusan : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Palembang, Februari 2008

Penulis,



6000
Tgl.
METAL TEMPEL

Fredy Ariyanto

Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : ANALISIS PENETAPAN TARGET PENERIMAAN
RETRIBUSI TERMINAL PADA DINAS
PERHUBUNGAN KOTA PALEMBANG

Nama : FREDY ARIYANTO
Nim : 22 2003 129
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Pemerintahan

Diterima dan Disyahkan

Pada Tanggal,

Pembimbing,



(M. Orba Kurniawan, SE. SH)

Mengetahui

Dekan

U. B. Ketua Jurusan Akuntansi



(Drs. Sunardi, SE. M.Si)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

"Hadapilah Apapun Itu, Walaupun Dengan Rasa Takut Mu"

Kupersembahkan kepada :

- 1. Papa dan Mama yang Kusayang*
- 2. Saudara-saudaraku Tercinta*
- 3. Seseorang yang Tersayang*
- 4. Sahabat-sahabatku Tercinta*
- 5. Almamaterku*

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarohkatuh

Alhamdulillahirobil A'lamin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul " Analisis Penentuan Target Penerimaan Retribusi Terminal Pada Dinas Perhubungan Kota Palembang" sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW.

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan merupakan tolak ukur di dalam memperlancar roda perekonomian. Pentingnya transportasi di dalam kehidupan tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa pelayanan angkutan khususnya angkutan barang dan angkutan orang bagi mobilitas orang dan barang dari dan seluruh pelosok tanah air bahkan manca negara. Untuk menjamin kualitas pelayanan yang tertib dan teratur diperlukan pengawasan dan pembinaan oleh pemerintah khususnya dalam bidang angkutan umum agar tidak berdampak pada kemacetan dan kecelakaan.

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ikut berperan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah yang nyata, dinamis, dan bertanggungjawab. Sejalan dengan usaha pemerintah dalam meningkatkan pemungutan hasil retribusi diperkirakan kepada masyarakat dan dunia usaha dengan cara memenuhi pelayanan tersebut. Retribusi daerah harus dipungut, dikelola secara profesional dan bertanggungjawab karena wewenang

pemungutan, pengelolaan dan pembangunan dana retribusi sepenuhnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Dari data dan wawancara yang dilakukan pada Dinas Perhubungan Sub Bagian Program mengenai potensi yang dimiliki bahwa setiap tahunnya jumlah kendaraan angkutan umum pertumbuhannya sedikit bahkan cenderung para pengusaha angkutan otobus untuk mengurangi jumlah kendaraanya. Fenomena yang diangkat dalam penelitian ini dimana pihak DISHUB tetap menaikkan target yang akan dicapai. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai retribusi terminal dengan judul : “Analisis Penetapan Target Penerimaan Retribusi Terminal Pada Dinas Perhubungan Kota Palembang ”.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada kepada kedua orang tua Ayah Darsun dan Ibu Samilah serta Kakak-kakak ku tersayang Ramlan, Ruslan, Lis, Sari, Sumi, Daryanto, Prayitno, Supriyadi dan keponakanku tercinta yang telah mendidik, membiayai, mendo'akan, dan memberikan dorongan semangat kepada penulis. Penulis juga banyak mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak M. Orba Kurniawan, SE. SH yang telah membimbing dan memberikan pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu juga penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.

1. Bapak H. M. Idris, SE. M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.

2. Bapak Drs. H. Rosyadi, SE. MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak Drs. Sunardi, SE. M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi dan Sekretaris Jurusan Akuntansi Bapak M. Irfan Tarmizi, SE, Ak, MBA Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Drs. Sunardi, SE. M.Si selaku Pembimbing Akademik.
5. Segenap tim pengajar dan staf administrasi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak H. Syaidina Ali selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang dan staf-staf yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Yang tercinta In-the, yang selalu mendukung dan mendo'akan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Saudara-saudara ku Darman, Ic-Hie, aRy, Albar, Sentot, Indra, Andre, Cotex, Muji, Enap, Endi, Rico, Ade, Urip, Moy, Sentot, Jhon, Robot, Parman, Lizon, Sikampok, Putri, Erik kom, Widi, Rendhi, Delon, Wanca, Agoes, BG 4697 MS, The Vocker, Kawan-kawan KKN Cinta Kasih.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas budi kebaikan kalian semuanya. Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alikum Warahmatullahi Wabəhrokatu.

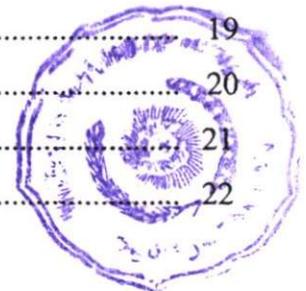
Palembang, Februari 2008
Penulis

Fredy Ariyanto

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PRAKATA	vi
HALAMAN DAFTAR ISI	ix
HALAMAN DAFTAR TABEL	xii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Sebelumnya.....	9
B. Landasan Teori.....	9
1. Retribusi Daerah.....	9
2. Jenis-jenis Retribusi Daerah.....	10
3. Terminal.....	13
4. Retribusi Terminal.....	14
5. Target.....	18
6. Penetapan Target.....	19
7. Rencana Penerimaan Target Retribusi.....	20
8. Potensi Retribusi Terminal.....	21
9. Proyeksi.....	22



BAB III METODE PENELITIAN	24
a. Jenis Penelitian.....	24
b. Tempat Penelitian	25
c. Operasionalisasi Variabel	25
d. Data yang diperlukan.....	25
e. Teknik Pengumpulan Data.....	26
f. Analisis Data dan Teknik Analisis	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	30
1. Sejarah Singkat Dinas Perhubungan Kota Palembang.....	30
2. Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kota Palembang	33
3. Kewenangan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Palembang.....	33
4. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas	35
5. Data	50
a. Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Terminal	51
b. Nama-nama Terminal dan Jenis Trayeknya di Kota Palembang	52
c. Tarif Retribusi Terminal pada Dinas Perhubungan Kota Palembang	53
d. Jumlah Rata-Rata Kepada Kendaraan Pada Masing- masing Terminal.....	54
B. Pembahasan.....	55
1. Analisis Potensi Retribusi Terminal Kota Palembang	55
2. Proyeksi.....	59

BAB V SIMPULAN DAN SARAN	63
A. Simpulan	63
B. Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1	Jumlah Kendaraan Angkutan Umum Menurut Jenisnya
	Tahun 2004 – 2007 4
Tabel I.2	Daftar Nama-nama Terminal di Kota Palembang 5
Tabel I.3	Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Terminal Pada
	Dinas Perhubungan Kota Palembang Tahun 2003 – 2007 6
Tabel II.1	Tarif Retribusi Terminal Dinas Perhubungan Kota
	Palembang 18
Tabel III.1	Operasionalisasi Variabel 25
Tabel IV.1	Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Terminal
	Pada Dinas Perhubungan Kota Palembang
	Tahun 2003-2007..... 51
Tabel IV.2	Data Nama-nama Terminal dan Jenis Trayek di Kota
	Palembang..... 52
Tabel IV.3	Tarif Retribusi Terminal Dinas Perhubungan Kota
	Palembang..... 53
Tabel IV.4	Jumlah Rata-rata Kepadatan Kendaraan Pada Masing-
	masing Terminal..... 54
Tabel IV.5	Data Potensi Retribusi Terminal Pada Sembilan Terminal
	Di kota Palembang..... 58
Tabel IV.6	Data Tabel Perhitungan Penetapan Target 62

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keterangan Selesai Riset dari Tempat Penelitian
- Lampiran 2 Fotocopy Aktifitas Bimbingan Skripsi
- Lampiran 3 Fotocopy Aktivitas Usulan Penelitian
- Lampiran 4 Fotocopy Sertifikat Mengaji
- Lampiran 5 Biodata Penulis



ABSTRAK

Fredy Ariyanto/222003129/Analisis Penetapan Target Penerimaan Retribusi Terminal Pada Dinas Perhubungan Kota Palembang.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Seberapa besar penetapan target retribusi terminal yang seharusnya pada Dinas Perhubungan Kota Palembang (Berdasarkan Potensi). Tujuan penelitian dalam penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar penetapan target retribusi terminal yang seharusnya pada Dinas Perhubungan Kota Palembang (Berdasarkan Potensi).

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk mengetahui nilai variabel mandiri baik satu variabel atau lebih (*independent*) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel lain. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi dan observasi, metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dan kuantitatif, penelitian ini bermanfaat bagi Dinas Perhubungan Kota Palembang sebagai bahan masukan dan pertimbangan serta pedoman dalam mengkaji, merencanakan dan menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan retribusi terminal, yang merupakan salah satu jenis retribusi daerah dan juga sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah. Menambah wawasan keilmuan mengenai potensi dan penetapan target retribusi terminal di kota Palembang serta bagi almamater dapat menjadi bahan masukan bagi pengembangan penelitian selanjutnya.

Hasil analisis menunjukkan Retribusi Terminal di Kota Palembang dilihat dari potensi yang dimiliki oleh dinas perhubungan (Dishub) kota Palembang, jika dilihat dari potensi retribusi terminal yang dimiliki dari tingkat potensial dilapangan maka pada tahun 2007 tingkat pencapaiannya sebesar 84,50 persen, apabila dari hasil analisis potensi lapangan bahwa potensi dilapangan didapatkan sebesar Rp 1.590.812.000. Dari hasil pengelolaan data proyeksi maka didapatkan bahwa target yang harus ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Palembang sebesar Rp. Rp. 1.437.247.653 dimana perhitungannya berdasarkan potensi yang ada dilapangan.

Kata Kunci : Penetapan target, potensi, proyeksi

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan serangkaian usaha yang dilakukan untuk merubah dan memperbaiki kondisi suatu daerah. Perkembangan pembangunan tersebut tidak terlepas dari faktor-faktor yang mendukung perkembangan tersebut, salah satunya adalah pelayanan jasa transportasi. Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan merupakan tolak ukur di dalam memperlancar roda perekonomian. Pentingnya transportasi di dalam kehidupan tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa pelayanan angkutan khususnya angkutan barang dan angkutan orang bagi mobilitas orang dan barang dari dan seluruh pelosok tanah air bahkan manca negara. Untuk menjamin kualitas pelayanan yang tertib dan teratur diperlukan pengawasan dan pembinaan oleh pemerintah khususnya dalam bidang angkutan umum agar tidak berdampak pada kemacetan dan kecelakaan.

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ikut berperan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah yang nyata, dinamis, dan bertanggungjawab. Sejalan dengan usaha pemerintah dalam meningkatkan pemungutan hasil retribusi diperkirakan kepada masyarakat dan dunia usaha dengan cara memenuhi pelayanan tersebut. Retribusi daerah harus dipungut, dikelola secara profesional dan bertanggungjawab karena wewenang

pemungutan, pengelolaan dan pembangunan dana retribusi sepenuhnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Melihat letak, luas, wilayah yang diharapkan Pemerintah Kota Palembang khususnya Dinas Perhubungan (DISHUB) yang dapat menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang khususnya pada retribusi terminal pada Dinas Perhubungan (DISHUB) Pemerintah Kota Palembang, adapun kegiatan-kegiatan yang dikelolanya yaitu :

1. Parkir tepi jalan
2. Pengujian kendaraan bermotor
3. Terminal
4. Jasa angkutan sungai, danau dan penyebrangan
5. Izin trayek
6. Pembinaan hubungan udara yaitu pos dan telekomunikasi

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa Restribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberi izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Jasa tertentu tersebut dikelompokkan dalam tiga golongan yaitu :

- a. Jasa umum.

Jasa umum yaitu balas jasa oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

b. Jasa usaha.

Jasa usaha yaitu jasa atau pelayanan yang dikerjakan oleh pemerintah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

c. Jasa perizinan tertentu.

Jasa perizinan tertentu yaitu kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas pemanfaatan keuangan, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Kota Palembang memiliki berbagai macam jenis transportasi yang setiap tahun bertambah tetapi tidak signifikan dalam artian persentase pertumbuhannya kecil. Bahkan para pengusaha trayek cenderung mengurangi jumlah kendaraannya. Adapun jumlah kendaraan berdasarkan trayek tahun 2004 sampai dengan 2007 sebagai berikut :

TABEL I.1
JUMLAH KENDARAAN ANGKUTAN UMUM
TAHUN 2004-2007

N O	JENIS KENDARAAN	TAHUN 2004	TAHUN 2005	TAHUN 2006	TAHUN 2007
1	Mobil Penumpang Umum	2143	2167	2136	2143
2	Bus Kecil	515	515	515	522
3	Bus Sedang / Bus Kota	567	590	527	520
4	Sedan Taxi	109	109	111	130
5	AKDP (Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi)	377	1384	1384	1390
6	AKAP (Angkutan Antar Kota Antar Provinsi)	387	387	387	388
Jumlah		5098	5152	5060	5093

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Palembang, Tahun 2007

Dari tabel diatas volume pertambahan jumlah kendaraan berdasarkan trayeknya yang pertambahannya tidak signifikan (kecil). Pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2005 terjadi pertambahan sebesar 1,05 persen, pada tahun 2006 volume jumlah kendaraan berkurang sebesar 1,8 persen dari tahun sebelumnya, dengan jumlah unit kendaraan sebanyak 5060. Pada Tahun 2007 juga terjadi pertambahan kendaraan sebesar 0,65 persen. Volume Jumlah kendaraan angkutan umum yang dimiliki Kota Palembang dari berbagai macam terminal yang tersebar di beberapa sudut kota, seperti yang terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel I.2
Data Nama-nama Terminal di Kota Palembang

NO.	Nama Terminal	Type	Luas M2
1.	Alang-Alang Lebar	A	8.000
2.	Karya Jaya	A	18.000
3.	Jaka Baring	C	8.000
4.	Plaju	C	3.750
5.	Sako Kenten	C	2.400
6.	Lemabang	C	1.600
7.	KM. 5	C	1.800
8.	7 Ulu	C	820
9.	Tangga Buntung	C	780

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Palembang, Tahun 2007

Dinas Perhubungan sebagai salah satu dinas yang mengatur ketertiban lalulintas di jalan raya dan yang berwenang memberikan izin trayek atau kartu pengusaha angkutan dan mempunyai peranan yang vital dalam pembangunan nasional. Terminal tersebut sangat berpotensi dalam menambah kas suatu daerah khususnya Kota Palembang, tetapi semakin meningkatnya jumlah peran terminal yang beraneka ragam yang ada di Kota Palembang menimbulkan suatu fenomena bahwa dari target yang hendak dicapai Dinas Perhubungan tidak dapat terealisasi yang dengan maksimal

Tabel I.3
Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Terminal Pada Dinas
Perhubungan Kota Palembang Tahun 2004-2007

Tahun	Target	Realisasi	%
2003	Rp. 1.200.000.000	Rp. 1.173.276.450	97,77
2004	Rp. 1.250.000.000	Rp. 1.390.147.125	111,21
2005	Rp. 1.750.000.000	Rp. 1.542.283.550	88,13
2006	Rp. 2.000.000.000	Rp. 1.405.754.200	70,29
2007	Rp. 2.000.000.000	Rp. 1.214.690.850	60,73

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Palembang, Tahun 2007

Dari tabel diatas dapat diketahui penerimaan retribusi Dinas Perhubungan Kota Palembang tahun 2003 sampai tahun 2007. Pada tahun 2003 target yang ditetapkan sebesar Rp. 1.200.000.000. target tersebut di tetapkan lebih besar dari tahun sebelumnya sebesar Rp.1.043.320.000 dengan tingkat pencapaian 97,77% pada tahun 2004 target yang ditetapkan Rp.1.250.000.000 dengan tingkat pencapaian sebesar 111,21% dan tahun 2005 target yang ditetapkan lebih besar dari tahun sebelumnya sebesar Rp.500.000.000 dengan tingkat pencapaian 88,13% juga pada tahun 2006 target ditetapkan lebih besar dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 250.000.000 dengan tingkat pencapaian 70,29 % disini terjadi penurunan tingkat pencapaian dari tahun sebelumnya sebesar 17,84 %, pada tahun 2007 target yang ditetapkan sama dengan tahun sebelumnya sebesar Rp. 2.000.000.000, tapi tingkat pencapaiannya hanya 60,73 %, turun dari tahun sebelumnya sebesar 9,56 %. Hanya tahun 2004 yang targetnya terpenuhi.

Dari uraian diatas dapat dilihat terjadinya penurunan penerimaan retribusi terminal. Dari data dan wawancara yang dilakukan pada Dinas Perhubungan Sub Bagian Program mengenai potensi yang dimiliki bahwa setiap tahunnya jumlah kendaraan angkutan umum pertambahannya sedikit (seperti pada tabel. 1.1), bahkan cenderung para pengusaha angkutan otobus untuk mengurangi jumlah kendaraanya. Fenomena yang diangkat dalam penelitian ini dimana pihak DISHUB tetap menaikkan target yang akan dicapai. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai retribusi terminal dengan judul : **“Analisis Penetapan Target Penerimaan Retribusi Terminal Pada Dinas Perhubungan Kota Palembang ”.**

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas maka permasalahan yang diangkat oleh peneliti adalah : Berapa besar Penetapan target retribusi terminal yang seharusnya ditetapkan pada Dinas Perhubungan Kota Palembang (berdasarkan potensi) ?

3. Tujuan penelitian

Berdasarkan masalah yang dikemukakan diatas adalah : Untuk mengetahui Berapa besar Penetapan target retribusi terminal yang seharusnya ditetapkan pada dinas perhubungan Kota Palembang (berdasarkan potensi).

4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pihak-pihak sebagai berikut :

a. Bagi Penulis

Menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman penulis dalam disiplin ilmu khususnya dalam pemungutan retribusi.

b. Bagi Dinas Perhubungan Kota Palembang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan, pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam meningkatkan penerimaan retribusi daerah sebagaimana mestinya .

c. Bagi Almamater

Hasil penelitian diharapkan menjadi referensi tambahan bagi penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya berjudul : Analisis Upaya-upaya Yang Dilakukan Untuk Meningkatkan Penerimaan Retribusi Terminal Di Kabupaten Ogan Komering Ilir yang telah dilakukan Rina (2007). Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan retribusi terminal di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan retribusi terminal di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu berupa hasil wawancara dengan kepala bagian keuangan dan karyawan bagian keuangan, dan data sekunder berupa sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi dan pembagian tugas serta data realisasi dan target penerimaan Retribusi Terminal tahun 2004 sampai 2006. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik wawancara dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif.

B. Landasan Teori

1. Retribusi daerah

Retribusi daerah adalah suatu pungutan daerah yang diperuntukkan sebagai pembayaran disebabkan pemakaian atau karena memperoleh jasa

dari pekerjaan, usaha atau milik daerah atau karena jasa yang diberikan oleh daerah, baik langsung maupun tidak langsung.

Mardiasmo (2002:100) menyatakan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa :

- a. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi orang atau badan.
- b. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melaksanakan pembayaran retribusi, termasuk pungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
- c. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah yang bersangkutan.

2. Jenis-jenis Retribusi Daerah

Adapun jenis-jenis retribusi daerah menurut Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 pasal 18 ayat (2) dan peraturan pemerintah nomor 66 thn 2001 Retribusi Daerah dibagi atas tiga golongan yaitu :

- a. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan

kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang retribusi Daerah dalam pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa jenis-jenis retribusi jasa umum adalah

1. Retribusi pelayanan kesehatan.
2. Retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan.
3. Retribusi pergantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil.
4. Retribusi pelayanan pemakaman dan pemakaman dan pengabuan mayat.
5. Retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum.
6. Retribusi pelayanan pasar.
7. Retribusi pengujian kendaraan bermotor.
8. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
9. Retribusi pergantian biaya cetak peta.
10. Retribusi pengujian kapal perikanan.

Subyek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan,yaitu orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi jasa umum.

- b. Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dalam menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang retribusi Daerah dalam pasal 3 ayat (2) disebutkan bahwa jenis-jenis retribusi jasa usaha adalah sebagai berikut

1. Retribusi pemakaian kekayaan daerah.
2. Retribusi pasar grosir dan pertokoan.
3. Retribusi tempat pelelangan.
4. Retribusi terminal.
5. Retribusi tempat khusus parkir.
6. Retribusi tempat penginapan atau persinggahan atau villa
7. Retribusi penyedotan kakus.
8. Retribusi rumah potong hewan.
9. Retribusi pelayanan pelabuhan kapal.
10. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga.
11. Retribusi tempat penyeberangan diatas air.
12. Retribusi pengolahan limbah cair.
13. Retribusi penjualan produksi usaha daerah

Subyek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan, subyek retribusi jasa usaha merupakan wajib retribusi

jasa usaha, yaitu orang pribadi/atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi jasa usaha.

- c. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, peraturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, sumberdaya alam, barang, prasarana dan sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang retribusi Daerah dalam pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa jenis-jenis retribusi perizinan tertentu adalah :

1. Retribusi izin mendirikan bangunan.
2. Retribusi tempat penjualan minuman beralkohol.
3. Retribusi izin gangguan.
4. Retribusi izin trayek.

Subjek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentudari pemerintah daerah,subyek retribusi perizinan tertentu,yaitu orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran perizinan tertentu.

3. Terminal

Berdasarkan Perda Nomor 17 Tahun 2002 pada pasal 1 huruf f menyatakan bahwa “ Terminal adalah pelayanan persediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan

usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah.”. Menurut kamus Bahasa Indonesia Surayin (2001:519) Terminal adalah tempat perhentian (bus, kereta, dsb) terakhir.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan pengertian terminal adalah tempat perhentian dan layanan persediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan dan usaha fasilitas lainnya.

4. Retribusi Terminal

Beberapa pengertian yang berkaitan dengan retribusi terminal menurut Perda Nomor 16 Tahun 1998 adalah :

- a. Retribusi terminal adalah retribusi yang dipungut atas pelayanan terminal.
- b. Pelayanan terminal adalah pelayanan persediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah.

Pelayanan terminal meliputi kegiatan sebagai berikut :

1. Setiap kendaraan yang melayani angkutan penumpang umum dan melewati terminal wajib untuk masuk terminal .
2. Khusus untuk bus AKAP dan AKDP wajib menaikkan dan menurunkan penumpangnya didalam terminal.

- c. Terminal penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan untuk menurunkan dan menamakan penumpang, perpindahan intra atau moda transportasi serta mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan umum.
- d. Karcis adalah tanda pembayaran retribusi terminal.
- e. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
- f. Pembayaran retribusi daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dibayar oleh wajib retribusi.
- g. Objek retribusi terminal adalah fasilitas terminal, sarana dan prasarana pendukung lainnya yang disediakan oleh pemerintah daerah.
- h. Subjek retribusi terminal adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan terminal.
- i. Retribusi terminal termasuk golongan retribusi jasa usaha.
- j. Cara mengukur tingkat retribusi terminal adalah pelayanan dan fasilitas yang disediakan pemerintah daerah dibidang pelayanan terminal.
- k. Petugas pemungut adalah orang yang diberikan tugas memungut retribusi terminal.
- l. TPR adalah tempat petugas memungut retribusi terminal.

Tujuan retribusi terminal adalah untuk menumbuhkan kesadaran dari masyarakat atau subjek retribusi baik orang pribadi atau badan dalam memberikan balas jasa kepada pemerintah karena telah menggunakan fasilitas terminal yang telah disediakan, sehingga pemerintah daerah dapat memberikan fasilitas yang aman, tertib dan teratur bagi kendaraan, pengemudi dan penumpang guna keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang. Pembinaan terminal dimaksudkan sebagai upaya pengaturan prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra atau antar transportasi serta pengaturan kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.

Pembinaan penyelenggaraan terminal dilaksanakan oleh pihak daerah melalui dinas perhubungan. Pembinaan tersebut meliputi kegiatan pengelolaan, pemeliharaan dan penertiban terminal.

Pengelolaan terminal meliputi kegiatan perencanaan pelaksanaan dan pengawasan terminal yang terdiri dari :

1. Penataan peralatan, fasilitas arus lalu lintas, jadwal petugas dan penyusunan system serta prosedur pengoperasian terminal.
2. Pelaksanaan pengaturan kegiatan parkir, pemungutan jasa pelayanan, pengoperasian fasilitas, pengaturan arus lalulintas dan pencatatan jadwal serta jenis kendaraan di dalam terminal.
3. Pengawasan kendaraan angkutan, pemanfaatan fasilitas dan keamanan serta ketertiban di dalam terminal.

Pemeliharaan terminal meliputi kegiatan sebagai berikut :

1. Menjaga keutuhan dan kebersihan terminal.
2. Menjaga keutuhan dan kebersihan peralatan terminal serta peralatan lampu dan papan informasi.
3. Merawat dan menjaga fungsi fasilitas.
4. Merawat saluran-saluran sepanjang terminal dan lampu penerangan.

Penyelenggaraan pelayanan terminal meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan dan fasilitas terhadap angkutan dan penumpang umum.
2. Memberikan pelayanan parkir khusus di dalam terminal.
3. Memberikan pelayanan dan fasilitas terhadap penumpang melalui peron.
4. Memberikan pelayanan dan fasilitas kamar mandi dan kamar kecil.
5. Memberikan pelayanan dan fasilitas dan ruang tunggu VIP.

Tata cara pemungutan retribusi terminal adalah sebagai berikut :

1. Pemungutan tidak dapat diborongkan.
2. Pelaksanaan pemungutan retribusi terminal dilaksanakan oleh Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
3. Retribusi dipungut dengan menggunakan karcis.

Tata cara pembayaran retribusi terminal adalah sebagai berikut :

1. Pembayaran retribusi terminal dimasukkan ke kas daerah selambat-lambatnya 1x24 jam.
2. Pembayaran retribusi terminal dilakukan secara tunai/lunas.

3. Dalam pembayaran retribusi terminal diberikan tanda bukti pembayaran.
4. Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
5. Bentuk isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi terminal ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

Tabel II
Tarif Retribusi Terminal Dinas Perhubungan Kota Palembang

No	Jenis kendaraan	Tarif
1.	AKAP Besar	10.000
2.	AKAP Sedang	5.000
3.	AKAP Kecil	2.500
4.	AKDP Sedang	3.000
5.	AKDP Kecil	1.500
6.	Travel	1.500
7.	Bus Kota	1.000
8.	Angkot	500
9.	Motor	500
10.	Mobil Pribadi	1.000
11.	Mobil Barang	1.000

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Palembang, Tahun 2007

5. Target

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang SAP (01-2) menyatakan bahwa target merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis dalam satu periode.

7. Rencana Penerimaan Target Retribusi

Menurut buku pedoman pelatihan dan bimbingan reformasi upaya peningkatan PAD bagi aparat pengelola Pendapatan Asli Daerah (2006:64) langkah – langkah yang harus dilakukan dalam rencana penerimaan target adalah menghitung potensi sesuai kondisi yang ada dilapangan, serta membuat data realisasi. Cara membuat proyeksi data realisasi sama dengan membuat proyeksi PDRB, perbedaannya adalah adanya variabel lain yaitu tingkat inflasi dan tingkat kenaikan tarif. Menggunakan tingkat inflasi jika tarif – tarif yang ada ditetapkan dalam bentuk persentase, dan jika ditetapkan dalam rupiah, maka menggunakan tingkat kenaikan tarif. Selisih antara tingkat kenaikan dari realisasi selama kurun waktu tertentu, dengan rata – rata tingkat inflasi atau rata tingkat kenaikan tarif akan didapatkan tingkat kenaikan riel. Tingkat kenaikan riel ini menggambarkan tingkat kemampuan pemerintah daerah c.q. dinas pendapatan daerah dalam merealisasikan target yang sudah ditetapkan tanpa melakukan tindakan apapun.

Tingkat kenaikan riel ditambah dengan besarnya tingkat inflasi atau tingkat kenaikan tarif dengan konstanta sebesar 100% kemudian dikalikan dengan data satu tahun sebelumnya, maka akan kita dapatkan hasil proyeksi data realisasi, begitu seterusnya untuk tahun – tahun selanjutnya.

Hasil perhitungan potensi diproyeksikan selama kurun waktu tertentu, kemudian kita bandingkan dengan data realisasi pada tahun

bersangkutan, hasil perbandingan ini kita dapatkan potensi terpendam maka hasilnya kita tambahkan dengan proyeksi data realisasi akan didapatkan target (perencanaan penerimaan tahun depan).

8. Potensi Retribusi Terminal

Prakosa dalam Akhmad (2006:18) berpendapat bahwa potensi dapat diukur melalui dua pendekatan yakni ; (i) berdasarkan fungsi penerimaan, (ii) berdasarkan atas indikator sosial ekonomi. Potensi adalah daya, kekuatan, atau kesangupan untuk menghasilkan penerimaan daerah, atau kemampuan yang pantas diterima dalam keadaan seratus persen. Sebagai contoh digunakannya retribusi daerah sebagai sasaran pengukuran potensi menurut fungsi perpajakan, dilakukan pengamatan atas pelaksanaan pemungutan retribusi yang bersangkutan dengan mengalihkan pengenaan retribusinya.

Menurut Akhmad (2006:18-19) untuk mendapatkan gambaran mengenai kemampuan pemungutan potensi retribusi daerah yang ada sebagai penerimaan daerah digunakan *Administration Eficiency Ratio* (AER) melalui tiga pendekatan.

- a. Dari segi subyek, akan memberikan gambaran tentang persentase dari sejumlah subyek yang dapat dijaring oleh unit/instansi yang menanggung pemungutan, baik itu untuk subyek yang sudah terdaftar maupun subyek yang belum terdaftar.
- b. Dari segi pemungutan, pada dasarnya sama dengan AER menurut subyek, hanya bedanya disini akan dapat digambarkan rasio dari



obyek retribusi pungutan yang telah terdaftar dan obyek retribusi yang belum terdaftar.

- c. Dari segi penerimaan, diukur melalui perbandingan jumlah realisasi penerimaan dengan potensi yang ada, semakin besar AER berarti semakin besar memungut, yang berarti pula aktivitas pemungutan dapat dicapai.

Sementara itu menurut Halim dalam Akhmad (2006 : 12) data/ informasi yang diperlukan untuk menghitung retribusi terminal adalah jumlah kepadatan kendaraan yang masuk terminal, rata-rata tarif pada masing-masing terminal, jumlah penerimaan dalam setiap kendaraan yang masuk terminal. Dalam penelitian ini metodologi yang digunakan penulis untuk menghitung potensi retribusi terminal dengan menghitung tarif rata-rata setiap masing-masing terminal dikalikan dengan jumlah rata-rata kepadatan kendaraan yang masuk terminal setiap hari. Secara rinci formulanya dapat ditulis sebagai berikut :

$$PRT = \sum RKK \times RT \times 365$$

dimana, PRT = Potensi Retribusi Terminal

RKK = Rata-rata Kepadatan Kendaraan

365 = 365 hari (1 tahun)

RT = Rata-rata Tarif

9. Proyeksi

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, Surayin (2001:459) proyeksi adalah perkiraan keadaan masa yang akan datang dengan menggunakan

data yang ada (sekarang). Menurut Buku Pedoman Pelatihan dan Bimbingan Reformasi Upaya Peningkatan PAD Bagi Aparat Pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) (2006:13), langkah-langkah dalam menghitung proyeksi data historis atau data realisasi dari pajak dan retribusi daerah adalah sebagai berikut :

1. Mencari realisasi data Retribusi Terminal dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.
2. Menghitung Tingkat Kenaikan data realisasi tersebut dengan, dengan menggunakan formulasi :

$$\text{Proyeksi} = \text{Potensi} - (\text{TKR} \times \text{Realisasi Tahun Sebelumnya})$$

Dimana,

Potensi : Kemampuan Pemungutan Potensi Retribusi Terminal

TKR : Tingkat Kenaikan Realisasi

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono (2004 : 11) jenis penelitian ini dikelompokkan menjadi:

1. Penelitian Deskriptif

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel lainnya.

2. Penelitian Komparatif

Penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan.

3. Penelitian Asosiatif

Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain.

B. Tempat Penelitian

Dalam pengumpulan data yang berkenaan dengan penelitian ini penulis mengambil tempat penelitian (riset) di Dinas Perhubungan Kota Palembang dan 9 buah terminal yang ada di kota Palembang, yaitu Teminal Alang-Alang Lebar, Teminal Karya Jaya, Teminal Jaka Baring, Teminal Plaju, Teminal Sako Kenten, Teminal Lemabang, Teminal KM. 5, Teminal 7 Ulu, Teminal Tangga Buntung serta unit-unit terminal.

C. Operasionalisasi Variabel

Tabel III.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Defenisi Variabel	Indikator
Penetapan target retribusi Dinas perhubungan Kota Palembang.	Sesuatu yang akan diperoleh dan ditetapkan secara resmi.	1. Potensi 2. Proyeksi a. Potensi terpendam b. Rencana tindakan c. Penetapan target

Sumber : Penulis, 2007

D. Data yang digunakan

Menurut Mudrajat Kuncoro (2003:127) ada dua jenis data yang dapat digunakan dalam penelitian yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dengan survey lapangan melalui wawancara dengan cara bertanya langsung kepada objek yang menjadi tempat penelitian.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi yang telah dikumpulkan untuk pihak atau instansi yang menjadi objek penelitian.

Berdasarkan cara memperolehnya dan ditinjau dari bentuknya, maka data yang diperlukan penulis dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

Data primer berupa :

Jumlah rata-rata kepadatan terminal pada sembilan terminal yang diteliti dan unit terminal, tarif rata-rata masing terminal.

Data sekunder berupa :

- a. Sejarah singkat Dinas Perhubungan Kota Palembang.
- b. Struktur organisasi dan pembagian tugas Dinas Perhubungan Kota Palembang.
- c. Target dan Realisasi Penerimaan Terminal Pada Dinas Perhubungan Kota Palembang Tahun 2003-2007.
- d. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Palembang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Nan Lin W. Gulo (2002:115-123) teknik pengumpulan data yaitu:

1. Pengamatan (observasi) adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian.

2. Survey adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan instrument untuk meminta tanggapan responden tentang sampel.
3. Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan responden.
4. Kuisisioner (angket) yaitu cara pengumpulan data dengan menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden, dengan harapan mereka akan memberi respon terhadap daftar pertanyaan tersebut.
5. Dokumen adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu lalu.

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dengan Dinas Perhubungan Kota Palembang dan petugas yang berwenang untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan data yang diperlukan.

b. Dokumentasi.

Dokumentasi dilakukan dengan cara menyalin dokumen-dokumen yang ada pada tempat penelitian dan teori-teori yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Pengamatan (observasi)

Pengumpulan data serta mencatat informasi selama penelitian.

F. Analisis Data dan Teknik Analisis

Menurut M. Iqbal Hasan (2002:32-33) menyatakan ada dua cara metode analisis yaitu :

1. Metode Analisis Kuantitatif adalah analisis data dimana datanya dinyatakan dalam bentuk angka-angka yang dapat diukur.
2. Metode Analisis Kualitatif adalah analisis data dimana datanya tidak dinyatakan dalam bentuk angka-angka.

Penulis dalam penelitian ini akan menggunakan metode analisis data secara kuantitatif dan kualitatif. Teknik analisis data dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan dilakukan secara kuantitatif dengan rumus sebagai berikut :

1. Potensi Retribusi Terminal adalah dengan cara menghitung kepadatan arus lalu lintas pada sembilan terminal dikalikan dengan jumlah tarif rata-rata untuk masing-masing terminal. Secara rinci formulanya dapat ditulis sebagai berikut :

$$PRT = \sum RKK \times RT \times 365$$

dimana, PRT = Potensi Retribusi Terminal

RKK = Rata-rata Kepadatan Kendaraan

365 = 365 hari (1 tahun)

RT = Rata-rata Tarif

2. Proyeksi adalah dari hasil potensi retribusi terminal dikurangi dengan menghitung dengan proyeksi maka didapat hasil potensi terpendam, dari hasil potensi terpendam tersebut dikalikan dengan rencana tindakan maka



hasilnya kita tambahkan proyeksi data realisasi selanjutnya akan didapatkan besarnya target yang harus ditetapkan. Dengan formula ;

$$\text{Proyeksi} = \text{Potensi} - (\text{TKR} \times \text{Realisasi tahun sebelumnya})$$

Dimana,

Potensi : Kemampuan pemungutan potensi retribusi terminal

TKR : Tingkat Kenaikan Realisasi

Teknik kualitatif dengan cara menjelaskan kebijakan penetapan target penerimaan retribusi terminal di Kota Palembang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat Dinas Perhubungan Kota Palembang

Dibentuknya Dinas Perhubungan Kota Palembang tidak serta merta diikuti perubahan instasional, melainkan tahapan-tahapan instansional yakni berawal dari terbentuknya Dinas LLAJ Palembang I, berubah menjadi Dinas LLAJR wilayah I, berubah lagi menjadi cabang Dinas 1 LLAJR Tingkat II Kodya Palembang. Dan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang penyerahan sebagian urusan pemerintahan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan Kepala Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

Untuk kelancaran taktis administrasi, setelah dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1995 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas LLAJ Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang, pada tanggal 26 Maret 1996 cabang Dinas 1 LLAJ Tingkat II Kodya Palembang Bapak Drs. H. Husni menjadi Dinas LLAJ Kotamadya Tingkat II Palembang yang keberadaannya dibawah Pemerintah Daerah Kotamadya Tingkat II Palembang. Dan berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, berupa istilah menjadi Dinas LLAJ Kota Palembang dan pada bulan Mei Tahun 2001 menjadi Dinas Perhubungan Kota Palembang.

Dinas Perhubungan Kota Palembang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dan bertanggung jawab kepada Walikota Palembang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 tentang pembentukan, kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi dinas daerah, bahwa Dinas Daerah yang ada di kota Palembang terdiri dari sembilan belas jenis, salah satunya adalah Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang perhubungan, yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas dibantu oleh seorang Wakil Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Dinas Perhubungan Kota Palembang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang perhubungan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan yang diterima oleh Dinas Perhubungan Kota Palembang diperoleh dari tujuh jenis retribusi, salah satunya adalah retribusi terminal. Retribusi Terminal merupakan bagian dari retribusi jasa usaha dan merupakan bagian dari kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan fasilitas tempat usaha berupa terminal bagi jalur transportasi masyarakat sehingga terciptanya pelayanan transportasi masyarakat yang aman, nyaman, lancar, selamat dan terjangkau dengan kapasitas yang memadai.

Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Palembang

1. Visi

Terwujudnya sarana, prasarana dan kualitas penyediaan jasa perhubungan yang mampu mendukung pertumbuhan pembangunan dan kepuasan pengguna jasa.

2. Misi

- a) Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan perhubungan melalui pengelolaan angkutan massal. Angkutan antar moda dan inter moda untuk mewujudkan jaminan keselamatan, aksesibilitas, mobilitas dan pemerataan pelayanan angkutan di Kota Palembang.
- b) Melakukan pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku perhubungan di Kota Palembang.
- c) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan serta mengembangkan manajemen keselamatan lalu lintas.
- d) Meningkatkan pembinaan SDM yang kreatif dan pro aktif untuk mengantisipasi perkembangan IPTEK.
- e) Mengembangkan budaya rasa memiliki pada masyarakat akan arti pentingnya keselamatan pemeliharaan fasilitas perhubungan.
- f) Menata kembali perundang-undangan sektor perhubungan berkaitan dengan perkembangan lingkungan strategis.

2. Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kota Palembang

a. Tujuan

- 1) Mewujudkan pemerataan pelayanan perhubungan yang aman dan nyaman sesuai dengan kemampuan membayar masyarakat.
- 2) Mengupayakan, merencanakan dan memfasilitaskan pengadaan dan pembangunan sarana, prasarana dan fasilitas penunjang keselamatan Perhubungan di Kota Palembang.

b. Sasaran

Yaitu “Terciptanya pelayanan transportasi laut, sungai dan penyeberangan yang aman, lancar, selamat dan terjangkau dengan kapasitas yang memadai sehingga menjamin mobilitas dan aksesibilitas orang, barang dan kendaraan serta informasi kesegala pelosok kota Palembang”.

3. Kewenangan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Palembang

a. Kewenangan

Pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain: “Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor, penyelenggaraan parkir kendaraan bermotor, pemasangan dan pemeliharaan perlengkapan jalan, perencanaan, pengawasan, pembinaan, pengendalian, bimbingan keselamatan dan memfasilitaskan pelaksanaan

kegiata dibidang ASDP, perhubungan laut dan kereta api serta dibidang perhubungan udara dan postel”.

b. Tugas Pokok

Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang perhubungan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Fungsi

- 1) Merumuskan kebijakan teknis dibidang perhubungan yang sifatnya mendukung secara operasional Kebijakan Pemerintah Kota Palembang.
- 2) Memberikan perizinan dan pelaksanaan umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Melaksanakan pembinaan UPTD(Unit Pelaksana Teknis Dinas)
- 4) Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Walikota tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya (perhubungan).
- 5) Mengadakan komunikasi, konsultasi dan kerja sama dengan unsur PEMDA dan Instansi serta masyarakat dalam usaha pelaksanaan tugas pokok.

4. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas

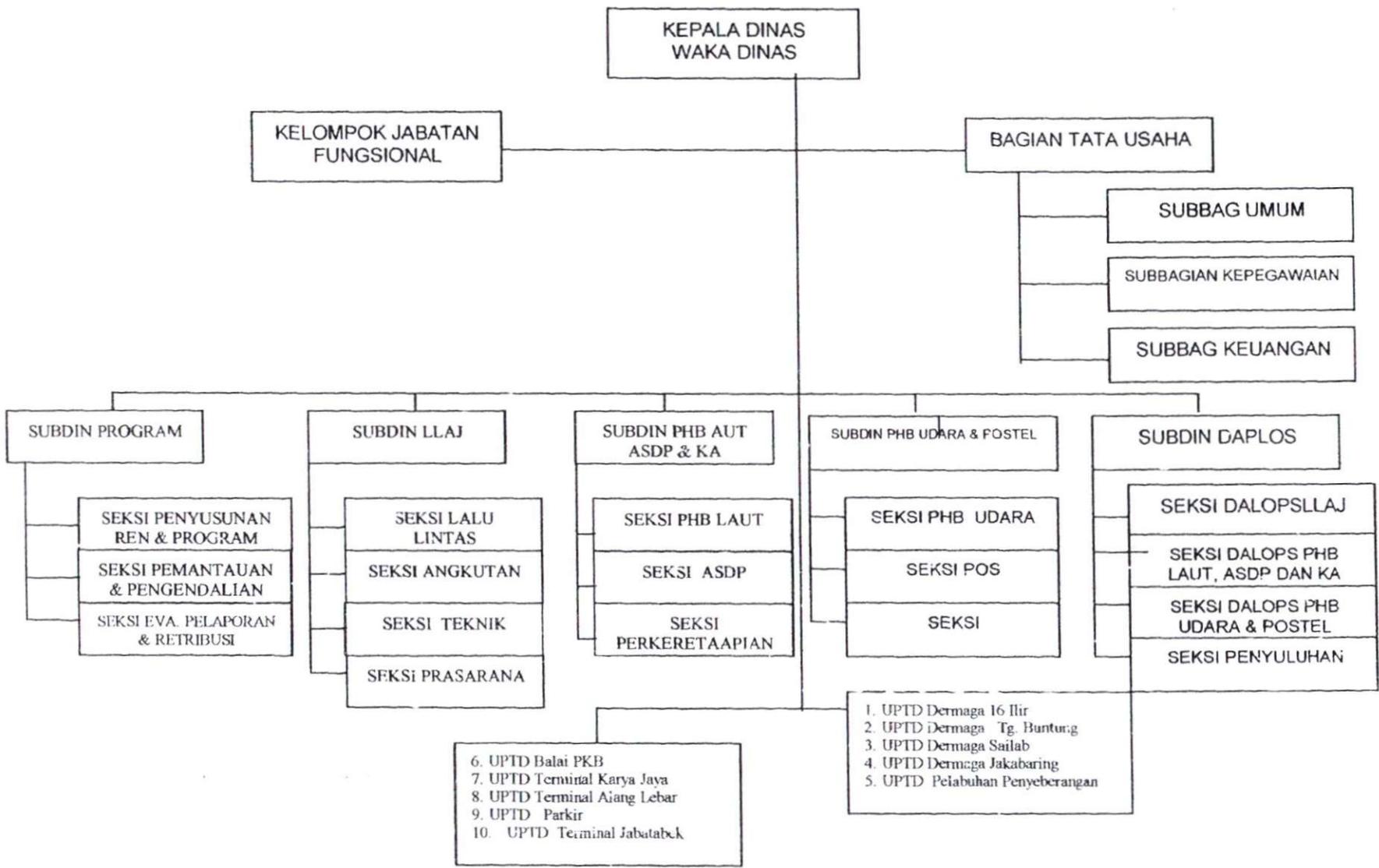
a. Struktur Organisasi

Struktur organisasi pada Dinas Perhubungan Kota Palembang diatur dalam Peraturan daerah kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 yaitu sebagai berikut:

- 1) Kepala Dinas
- 2) Wakil Kepala Dinas
- 3) Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum
 - b. Sub Bagian Kepegawaian
 - c. Sub Bagian Keuangan
- 4) Sub Dinas Program, terdiri dari:
 - a. Seksi Penyusunan Rencana dan Program
 - b. Seksi Pemantauan dan Pengendalian
 - c. Seksi Evaluasi, Pelaporan dan Retribusi
- 5) Sub Dinas Lalu Lintas dan Angkutan jalan , terdiri dari:
 - a. Seksi Lalu Lintas
 - b. Seksi Angkutan
 - c. Seksi Teknis Sarana
 - d. Seksi Prasarana
- 6) Sub Dinas Perhubungan Laut, Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Kereta api, terdiri dari:
 - a. Seksi Perhubungan laut

- b. Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
 - c. Seksi Pengkretaapian
- 7) Sub Dinas perhubungan Udara, Pos dan Telekomunikasi, terdiri dari:
- a. Seksi Perhubungan Udara
 - b. Seksi Pos
 - c. Seksi Telekomunikasi
- 8) Sub Dinas pengendalian Operasional, terdiri dari:
- a. Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - b. Seksi Pengendalian Operasional Perhubungan laut, Angkutan Sungai, Danau, penyeberangan dan Kereta Api.
 - c. Seksi Pengendalian Operasional Perhubungan Udara, Pos dan Telekomunikasi.
 - d. Seksi Penyuluhan.
- 9) Cabang Dinas, terdiri dari:
- a. Kepala Cabang Dinas
 - b. Unsur Staf/Petugas Administrasi
 - c. Unsur Lini/Petugas teknis Operasional
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 10) Unit Pelaksana Teknis Dinas, terdiri dari:
- a. Kepala
 - b. Unsur Staf/Petugas Administrasi
 - c. Unsur Lini/Petugas Teknis Operasional
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional
- 11) Kelompok Jabatan Fungsional

GAMBAR IV. 1
STRUKTUR ORGANISASI DINAS
PERHUBUNGAN KOTA PALEMBANG



2. Wakil Kepala Dinas

Wakil Kepala Dinas mempunyai tugas mengkoordinir urusan perencanaan, pembinaan, kepegawaian, keuangan dan pengawasan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Wakil Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a) Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- b) Mengkoordinasikan kegiatan Bagian Tata Usaha, Sub Dinas, Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan kelompok Jabatan Fungsional yang ada dalam lingkungannya dan bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan tugas tersebut.
- c) Memberikan saran atau pertimbangan kepada Kepala Dinas mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- d) Menjalankan tugas dan fungsi Kepala Dinas sehari-hari apabila Kepala Dinas berhalangan atau berada diluar daerah berdasarkan surat penunjukan Kepala Dinas.

3. Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, hukum dan humas serta urusan umum.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a) Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.
- b) Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.
- c) Melaksanakan pengelolaan administrasi hukum dan humas.
- d) Melaksanakan urusan ketatausahaan dan kearsipan.

Bagian Tata Usaha, terdiri dari:

- a) Sub Bagian Umum

Mempunyai tugas mengurus surat-menyurat dan mengelola arsip.

- b) Sub Bagian Kepegawaian

Mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan kepegawaian .

- c) Sub Bagian Keuangan

Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan.

4. Sub Dinas Program

Sub Dinas Program mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data dan informasi dalam rangka penyusunan rencana dan program kerja, melakukan pemantauan dan pengendalian serta evaluasi pelaporan.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Sub Dinas Program mempunyai fungsi:

- a) Menyiapkan bahan pengumpulan dan pengolahan data
- b) Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja dibidang perhubungan

- c) Menyiapkan bahan pelaksanaan pemantaun dan pengendalian pelaksanaan program
- d) Menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi, pelaporan kegiatan dan mengelola retribusi dibidang perhubungan

Sub Dinas Program terdiri dari:

- a) Seksi Penyusunan Rencana dan Program
Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang perhubungan.
- b) Seksi Pemantauan dan Pengendalian
Mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan bidang perhubungan.
- c) Seksi Evaluasi, Pelaporan dan Retribusi
Mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang perhubungan serta kegiatan retribusi yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.

5. Sub Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Sub Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengawasan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan manajemen lalu lintas, manajemen angkutan, prasarana serta keselamatan dan teknis sarana. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Sub Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai fungsi:

jalan serta bahan pemantauan dan analisis kinerja prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

d) Seksi Teknik Sarana

Mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan inventaris, pembinaan perbengkelan umum, penataan izin pendirian bengkel umum serta pengaturan dan pengendalian susunan alat tambahan pada kendaraan penumpang umum, serta pembinaan terhadap pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dan ketentuan teknis dan jalan kendaraan.

6. Sub Dinas Perhubungan Laut , Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan (ASDP) dan Kerata Api.

Sub Dinas Perhubungan Laut, Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan (ASDP) dan Kerata Api mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengawasan, pembinaan, pengendalian dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan perhubungan laut, lalu lintas angkutan sungai , danau, penyeberangan dan kereta api.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Sub Dinas Perhubungan Laut, Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan (ASDP) dan Kerata Api mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan rencana pembinaan, pengawasan, pengendalian dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan lalu lintas laut, sungai, danau, penyeberangan dan kereta api.

- b) Penyusunan rencana pembinaan, pengawasan, pengendalian dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan angkutan laut, sungai, danau, penyeberangan dan kereta api.
- c) Penyusunan rencana pembinaan, pengawasan, pengendalian dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penyediaan prasarana dan sarana perhubungan laut, angkutan sungai, danau, penyeberangan dan kereta api.
- d) Penyusunan rencana pembinaan, pengawasan, pengendalian dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan untuk menunjang keselamatan lalu lintas laut dan angkutan sungai, danau, penyeberangan dan kereta api.

Sub Dinas Perhubungan Laut, Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan (ASDP) dan Kerata Api terdiri dari:

- a) Seksi Perhubungan Laut

Mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan kegiatan lalu lintas angkutan laut, penyediaan dan pembangunan prasarana perhubungan laut dan memantau serta mengevaluasi kegiatan pelabuhan laut.

- b) Seksi Angkutan Sungai , Danau, Penyeberangan

Mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan kegiatan lalu lintas angkutan sungai , danau, penyeberangan dan memantau serta mengevaluasi kegiatan dipelabuhan penyeberangan.



c) Seksi Pengkretaapian

Mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan kegiatan lalu lintas jalan rel dan memantau serta mengevaluasi kegiatan distasiun kerta api.

7. Sub Dinas Perhubungan Udara, Pos dan Telekomunikasi

Sub Dinas Perhubungan Udara, Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengawasan, pembinaan, pengendalian dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan kebandar udara serta penunjang pelaksanaan penerbangan pos dan telekomunikasi.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Sub Dinas Perhubungan Udara, Pos dan Telekomunikasi mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan rencana pengawasan, pembinaan, pengendalian dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan kebandar udaraan.
- b) Penyusunan rencana pengawasan, pembinaan, pengendalian dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan angkutan udara serta penunjang keselamatan penerbangan.
- c) Penyusunan rencana pengawasan, pembinaan, pengendalian dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan usaha jasa telekomunikasi.

Sub Dinas Perhubungan Udara, Pos dan Telekomunikasi terdiri dari:

a) Seksi Perhubungan Udara

Mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan penerbitan rekomendasi pembangunan didalam bandar udara dan pemberian

izin lokasi bandar udara serta melakukan penyiapan bahan pemberian rekomendasi penerbitan IMB bagi bangunan dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP), serta pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan angkutan udara.

b) Seksi Pos

Mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi kegiatan filateli, izin jasa titipan dan bahan pembinaan kegiatan usaha jasa pos.

c) Seksi Telekomunikasi

Mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan izin penyelenggaraan instalasi, kabel rumah (IKRG), pengujian alat telekomunikasi dan bahan pembinaan kegiatan usaha jasa telekomunikasi.

8. Sub Dinas Pengendalian Operasional

Sub Dinas Pengendalian Operasional mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas angkutan jalan, angkutan laut, angkutan sungai danau penyeberangan, angkutan jalan rel, angkutan udara, pos dan telekomunikasi serta menyiapkan bimbingan keselamatan dan penertiban pada sektor perhubungan.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Sub Dinas Pengendalian Operasional mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan rencana pengawasan dan pengendalian lalu lintas angkutan jalan, angkutan laut, angkutan sungai danau penyeberangan, angkutan jalan rel, angkutan udara, pos dan telekomunikasi.
- b) Penyusunan rencana bimbingan keselamatan lalu lintas angkutan jalan, angkutan laut, angkutan sungai danau penyeberangan, angkutan jalan rel, angkutan udara, pos dan telekomunikasi.
- c) Penyusunan rencana pembinaan penegakan hukum dibidang perhubungan.
- d) Penyusunan rencana pembinaan dan pemberian bimbingan serta penyuluhan kepada masyarakat dan memfasilitasi kegiatan bimbingan dan penyuluhan.

Sub Dinas Pengendalian Operasional terdiri dari:

- a) Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta bimbingan keselamatan lalu lintas angkutan jalan.
- b) Seksi Pengendalian Operasional Perhubungan Laut, Angkutan Sungai Danau Penyeberangan dan Kereta Api.
Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian serta bimbingan keselamatan lalu lintas angkutan

- a) Penyusunan rencana pengawasan dan pengendalian lalu lintas angkutan jalan, angkutan laut, angkutan sungai danau penyeberangan, angkutan jalan rel, angkutan udara, pos dan telekomunikasi.
- b) Penyusunan rencana bimbingan keselamatan lalu lintas angkutan jalan, angkutan laut, angkutan sungai danau penyeberangan, angkutan jalan rel, angkutan udara, pos dan telekomunikasi.
- c) Penyusunan rencana pembinaan penegakan hukum dibidang perhubungan.
- d) Penyusunan rencana pembinaan dan pemberian bimbingan serta penyuluhan kepada masyarakat dan memfasilitasi kegiatan bimbingan dan penyuluhan.

Sub Dinas Pengendalian Operasional terdiri dari:

- a) Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta bimbingan keselamatan lalu lintas angkutan jalan.
- b) Seksi Pengendalian Operasional Perhubungan Laut, Angkutan Sungai Danau Penyeberangan dan Kereta Api.
Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian serta bimbingan keselamatan lalu lintas angkutan

jalan, angkutan sungai danau penyeberangan dan angkutan jalan rel.

- c) Seksi Pengendalian Operasional Perhubungan Udara, Pos, dan Telekomunikasi.

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian serta bimbingan keselamatan lalu lintas angkutan udara serta kelancaran pelaksanaan kegiatan pos dan telekomunikasi.

- d) Seksi Penyuluhan

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dibidang perhubungan.

9. Cabang Dinas

Cabang Dinas merupakan unsur pelaksana teknis operasional dinas.

Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Cabang Dinas mempunyai fungsi:

- a) Melaksanakan unsure teknis operasional
- b) Melaksanakan urusan administrasi

Susunan organisasi Cabang Dinas terdiri dari:

- a) Kepala Cabang Dinas
- b) Unsur Staf/Petugas Administrasi

- c) Unsur Lini/Petugas Teknis Operasional
- d) Kelompok Jabatan Fungsional

10. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur Pelaksana Teknis Operasional Dinas. Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas disatu atau beberapa wilayah kecamatan dan satu daerah.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi:

- a) Melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan bidangnya
- b) Pelaksanakan urusan administrasi

Susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari:

- a) Kepala
- b) Unsur Staf/Petugas Administrasi
- c) Unsur Lini/Petugas Teknis Operasional
- d) Kelompok Jabatan Fungsional

11. Kelompok Jabatan Fungsional

- a) Kelompok Jabatan Fungsional didalam lingkup Dinas Daerah mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis dinas sesuai dibidang keahlian masing-masing.

- b) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi kedalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior.
- c) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- d) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior, sebagai Ketua Kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bersangkutan.

5. Data yang Digunakan

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data baik data yang ada di dinas perhubungan kota Palembang maupun yang didapat dari observasi lapangan dan diolah kembali dengan formulasinya rumus yang relevan dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari Dinas Perhubungan Kota Palembang dan Data di Lapangan yaitu :

a. Penetapan Target yang ada Pada Dinas Perhubungan Kota Palembang

Berdasarkan wawancara pada Dinas Perhubungan Kota Palembang :

1. Menghitung potensi retribusi terminal
2. Menentukan rencana kebijakan untuk menetapkan target
3. Rencana target dirapatkan bersama walikota
4. Uji kelayakan oleh Dinas Perhubungan untuk target yang akan ditetapkan
5. Target yang akan ditetapkan diajukan ke DPR untuk disahkan.

b. Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Terminal

Tabel IV.1
Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Terminal Pada Dinas Perhubungan Kota Palembang Tahun 2003-2007

Tahun	Target	Realisasi	%
2003	Rp. 1.200.000.000	Rp. 1.173.276.450	97,77
2004	Rp. 1.250.000.000	Rp. 1.390.147.125	111,21
2005	Rp. 1.750.000.000	Rp. 1.542.283.550	88,13
2006	Rp. 2.000.000.000	Rp. 1.405.754.200	70,29
2007	Rp. 2.000.000.000	Rp. 1.214.690.350	60,73

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Palembang, Tahun 2007

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui penerimaan retribusi terminal di kota Palembang masih berfluktuasi, pada tahun 2003 realisasi penerimaan retribusi terminal sebesar Rp. 1.173.276.450, dan pada tahun 2004 adanya kenaikan realisasi dari tahun sebelumnya sebesar Rp.

1.390.147.125 namun pada tahun 2005 – 2007 penerimaannya tidak mencapai target disebabkan penentuan target yang belum realistis.

c. Nama-nama Terminal dan Jenis Trayeknya di Kota Palembang

Tabel IV.2
Data Nama-nama Terminal dan Jenis Trayek di Kota Palembang
Tahun 2007

NO.	Nama Terminal	Tipe	Trayek
1.	Alang-Alang Lebar	A	Plaju-KM.12 (bus kota), TKJ-KM.12 (bus kota), AKAP, AKDP, TKJ/Musi II/KM.12 (bus kecil). Terminal AAL-Jaka Baring, Sedan Taxi.
2.	Karya Jaya	A	Ampera-Kertapati (bus kecil), TKJ-KM. 12 (bus kota), TKJ-Pusri (bus kota) TKJ-Perumnas (bus kecil) TKJ/Musi II/KM.12 (bus kecil), Sedan Taxi.
3.	Jaka Baring	C	Bukit Besar-Jaka Baring (bus sedang), Terminal AAL-Terminal Jaka Baring (bus kecil), Perumnas-Jaka Baring (bus kota), Simpang Jaka Baring-TOP, Simpang Jaka Baring-OPI (MPU), Simpang Jaka Baring-TL.Harapan (MPU).
4.	Plaju	C	Ampera-Plaju (bus kecil), Plaju-KM.12 (bus kota), Plaju-Pusri (bus kota), Plaju-Perumnas (bus kota).
5.	Sako Kenten	C	Terminal Sako-Terminal AAL (bus sedang), Kuto-Kenten Laut (MPU).
6.	Lemabang	C	Ampera-Lemabang (MPU), Sayangan-Lemabang (MPU), Lemabang-Sei Lais (MPU).
7.	KM. 5	C	Ampera-KM.5 (MPU), Wayhitam-TL.Betutu (MPU).
8.	7 Ulu	C	Ampera-Sekip (MPU), Amper-Lemabang (MPU), Ampera-Tangga Buntung (MPU), Ampera-Pakjo (MPU), Ampera-Bukit Besar (MPU), Ampera-KM.5 (MPU), Ampera-Kertapati (bus kecil), Plaju-Perumnas (MPU), Ampera-Pasar Induk (MPU).
9.	Tangga Buntung	C	Ampera-Tangga Buntung (MPU).
	Pos-pos Terminal		
1.	Pos Musi II		Simpang RRI-Musi II(MPU).
2.	Pos Sekip		Ampera-Sekip (MPU)

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Palembang, Tahun 2007(diolah)

d. Tarif Retribusi Terminal pada Dinas Perhubungan Kota Palembang

Tabel IV.3
Tarif Retribusi Terminal Dinas Perhubungan Kota Palembang

No	Jenis kendaraan	Tarif (Rp)
1.	AKAP Besar	10.000
2.	AKAP Sedang	5.000
3.	AKAP Kecil	2.500
4.	AKDP Sedang	3.000
5.	AKDP Kecil	1.500
6.	Travel	1.500
7.	Bus Kota	1.000
8.	Angkot	500
9.	Motor	500
10.	Mobil Pribadi	1.000
11.	Mobil Barang	1.000

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Palembang, Tahun 2007

Tabel diatas merupakan tarif retribusi terminal untuk masing-masing terminal di Kota Palembang, untuk terminal tipe A, semua jenis kendaraan masuk ke terminal tipe A tersebut, namun untuk terminal tipe C tidak seluruhnya kendaraan yang masuk terminal tersebut, kendaraan yang masuk terminal tipe C hanya Bus Penumpang Umum seperti Bus Kota dan Angkot, sehingga didapat rata-rata tarif untuk terminal tipe A dan terminal tipe C. Adapun rata-rata tarif untuk masing-masing tipe terminal dapat dilihat pada perhitungan dibawah ini :

Rata- rata tarif untuk terminal tipe A

$$= \frac{\text{keseluruhan jumlah tarif semua jenis kendaraan}}{\text{Total jenis tipe kendaraan}}$$

$$= \frac{10.000+5.000+2.500+3.000+1.500+1.500+1.000+500+500+1.000+1.000}{11}$$

$$= \text{Rp. 2.500}$$

Jadi rata-rata tarif untuk terminal tipe A adalah Rp. 2.500

Rata-rata tarif terminal tipe C

$$= \frac{\text{Jenis kendaraan angkot} + \text{Jenis kendaraan bus kota}}{\text{Total jenis kendaraan}}$$

$$= \frac{1.000+500}{2}$$

= Rp. 750

Jadi rata-rata tarif untuk terminal tipe C adalah Rp. 750

e. Jumlah Rata-Rata Kepadatan Kendaraan Pada Masing-Masing Terminal

Adapun jumlah rata-rata kepadatan kendaraan pada masing-masing terminal dapat dilihat pada tabel IV.4 berikut ini :

Tabel IV.4
Jumlah Rata-rata Kepadatan Kendaraan Pada
Masing-masing Terminal

No	Nama Terminal/Unit Terminal	Rata-rata Kepadatan Kendaraan/ per hari (Unit)	Jumlah Rata-rata Kepadatan Kendaraan Pada Terminal		
			Minggu	Bulan	Tahun
			1 x 7	1 x 30	1 x 365
1.	Alang-Alang Lebar	605	4.235	18.150	220.825
2.	Karya Jaya	530	3.710	15.900	193.450
3.	Jaka Baring	231	1.617	6.930	84.315
4.	Plaju	362	2.534	10.860	132.130
5.	Sako Kenten	335	2.345	10.050	122.275
6.	Lemabang	240	1.680	7.200	87.600
7.	KM. 5	189	1.323	5.670	68.985
8.	7 Ulu	345	2.415	10.350	125.925
9.	Tangga Buntung	196	1.372	41.160	71.540
10.	Pos Musi	53	371	1.590	19.345
11.	Pos Sekip	74	518	2.220	27.010
Total		3.160	221.20	130.080	1.153.400

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan 2007 (diolah)

Rozario
Tuduhur J.

Dari tabel diatas rata-rata kepadatan jumlah kendaraan didapat dari jumlah kendaraan yang masuk terminal pada 9 terminal yang ada di kota Palembang selama satu hari. Jumlah rata-rata kepadatan kendaraan paling banyak terdapat pada terminal Alang-Alang Lebar (AAL) dengan jumlah rata-rata kepadatan kendaraan per harinya adalah sebanyak 605 unit. Sedangkan jumlah rata-rata kendaraan paling sedikit terdapat pada unit terminal pos Musi II dengan jumlah rata-rata kepadatan kendaraan sebanyak 53 unit.

f. Program Rencana Tindakan

Adapun ketentuan program rencana tindakan yang digunakan untuk menentukan target yaitu 50 % jika potensi dianggap bertambah untuk tahun-tahun selanjutnya dan 20 % jika potensi dianggap cenderung tetap.

B. Pembahasan

Dalam sub Bab ini akan menganalisis hasil penelitian penulis mengenai penetapan target retribusi terminal pada Dinas Perhubungan Kota Palembang. Kemudian membandingkan dengan Adapun untuk mengetahui penetapan target yang seharusnya penulis akan melakukan perhitungan terlebih dahulu yaitu, menghitung potensi dan proyeksi terminal.

1. Perhitungan Potensi Retribusi Terminal Kota Palembang

Potensi Retribusi Terminal adalah perkalian antara total dari seluruh arus kepadatan terminal dengan rata-rata tarif retribusi terminal. Jumlah penerimaan masing-masing terminal dapat dihitung dengan mengalikan antara rata-rata kepadatan kendaraan pada terminal dengan rata-rata tarif masing-masing terminal. Formulasinya dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$PRT = \sum RKK \times RT \times 365$$

dimana, PRT = Potensi Retribusi Terminal

RKK = Rata-rata Kepadatan Kendaraan

RT = Rata-rata Tarif

365 = 365 hari (1 tahun)

Dengan menggunakan rumus tersebut diatas, maka potensi retribusi terminal dari sembilan terminal dan unit-unit terminal untuk tahun 2007 dapat dihitung sebagai berikut :

1. Terminal Alang-alang Lebar (Tipe A)

$$PRT = \sum RKK \times RT \times 365$$

$$= 605 \times 2500 \times 365$$

$$= \text{Rp. } 552.062.500$$

2. Karya Jaya (Tipe A)

$$PRT = \sum RKK \times RT \times 365$$

$$= 530 \times 2500 \times 365$$

$$= \text{Rp. } 483.625.000$$

3. Jaka Baring (Tipe C)

$$PRT = \sum RKK \times RT \times 365$$

$$= 231 \times 750 \times 365$$

$$= \text{Rp. } 63.236.250$$

4. Plaju (Tipe C)

$$PRT = \sum RKK \times RT \times 365$$

$$= 362 \times 750 \times 365$$

$$= \text{Rp. } 99.097.500$$

5. Sako Kenten (Tipe C)

$$\text{PRT} = \sum \text{RKK} \times \text{RT} \times 365$$

$$= 335 \times 750 \times 365$$

$$= \text{Rp. } 91.706.250$$

6. Lemabang (Tpe C)

$$\text{PRT} = \sum \text{RKK} \times \text{RT} \times 365$$

$$= 240 \times 750 \times 365$$

$$= \text{Rp. } 65.700.000$$

7. KM. 5 (Tipe C)

$$\text{PRT} = \sum \text{RKK} \times \text{RT} \times 365$$

$$= 189 \times 750 \times 365$$

$$= \text{Rp. } 51.738.750$$

8. 7 Ulu (Tipe C)

$$\text{PRT} = \sum \text{RKK} \times \text{RT} \times 365$$

$$= 345 \times 750 \times 365$$

$$= \text{Rp. } 94.443.750$$

9. Tangga Buntung (Tipe C)

$$\text{PRT} = \sum \text{RKK} \times \text{RT} \times 365$$

$$= 196 \times 750 \times 365$$

$$= \text{Rp. } 53.655.000$$

10. Pos Musi

$$\begin{aligned} \text{PRT} &= \sum \text{RKK} \times \text{RT} \times 365 \\ &= 53 \times 750 \times 365 \\ &= \text{Rp. } 14.508.750 \end{aligned}$$

11. Pos Tg. Buntung

$$\begin{aligned} \text{PRT} &= \sum \text{RKK} \times \text{RT} \times 365 \\ &= 74 \times 750 \times 365 \\ &= \text{Rp. } 20.257.500 \end{aligned}$$

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel IV.5 berikut :

Tabel IV.5
Data Potensi Retribusi
Terminal pada Sembilan Terminal di Kota Palembang
2007

No.	Nama Terminal/Unit Terminal	Rata-rata Kepadatan Kendaraan (Unit)	Rata-rata tarif masing-masing tipe terminal	Penerimaan Masing-masing Terminal per hari (Rp)	Potensi Retribusi terminal/ tahun (Rp)
1.	Alang-Alang Lebar	605	2500	1.512.500	552.062.500
2.	Karya Jaya	530	2500	1.325.000	483.625.000
3.	Jaka Baring	231	750	173.250	63.236.250
4.	Plaju	362	750	271.500	99.097.500
5.	Sako Kenten	335	750	251.250	91.706.250
6.	Lemabang	240	750	18.000	65.700.000
7.	KM. 5	189	750	141.750	51.738.750
8.	7 Ulu	345	750	285.750	94.443.750
9.	Tangga Buntung	196	750	147.000	53.655.000
10.	Pos Musi	53	750	39.750	14.508.750
11.	Pos Sekip	74	750	55.500	20.257.500
Total Potensi setahun		3.160	750	4.221.250	1.590.081.250

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan 2007 (diolah)

Berdasarkan tabel diatas, yang memiliki potensi penerimaan retribusi terminal terbesar adalah Terminal Alang-alang Lebar (AAL) yaitu Rp. 552.052.500, penerimaan terbesar kedua adalah Terminal Karya Jaya (TKJ) yaitu sebesar Rp. 483.625.000 tipe terminal AAL dan TKJ ini adalah tipe A, semua jenis kendaraan baik yang roda dua, maupun roda empat (penumpang, pribadi) dikenakan pembayaran retribusi terminal. selanjutnya, untuk terminal tipe C seperti terminal Plaju penerimaannya sebesar Rp. 99.097.500 penerimaannya kecil disebabkan karena terminal Plaju adalah terminal tipe C karena tidak semua jenis kendaraan masuk terminal yang dikenakan retribusi terminal hanya kendaraan angkutan jenis penumpang umum. Dari perhitungan hasil dari jumlah potensi retribusi terminal untuk masing-masing terminal maka untuk mencari target yang harus ditetapkan, selanjutnya proyeksi dapat dihitung dari jumlah potensi retribusi terminal.

2 Perhitungan Proyeksi

Proyeksi adalah perkiraan keadaan masa yang akan datang dengan menggunakan data yang ada. Proyeksi yang direncanakan untuk mengetahui seberapa jauh organisasi dapat mencapai proyeksi yang diharapkan secara realistis.

Proyeksi dapat dihitung dari hasil potensi retribusi terminal dikurangi dengan menghitung dengan proyeksi maka didapat hasil potensi terpendam, dari hasil potensi terpendam tersebut dikalikan dengan rencana tindakan maka hasilnya kita tambahkan data realisasi tahun

sebelumnya, selanjutnya akan didapatkan berapa besarnya target yang harus ditetapkan. Adapun formula untuk mencari proyeksi retribusi terminal dalam menetapkan target sebagai berikut :

$$\text{Proyeksi} = \text{Potensi} - (\text{TKR} \times \text{Realisasi tahun sebelumnya})$$

$$\text{Rata-rata TKR} = \frac{\text{Realisasi tahun ini} - \text{Realisasi tahun sebelumnya} \times 100 \%}{\text{Realisasi tahun sebelumnya}}$$

$$\text{Potensi terpendam} = \text{Potensi} - \text{Proyeksi}$$

$$\text{Rencana tindakan} = 20 \% \times \text{Potensi terpendam}$$

Dimana 20 % : apabila potensi dianggap tetap untuk tahun-tahun berikutnya maka ditetapkan 20%.

Untuk menentukan Target dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Target} = \text{Proyeksi} + \text{Rencana Tindakan}$$

Maka perhitungan untuk mencari target pada tahun 2007 :

$$\text{TKR} = \frac{\text{Rp. } 1.214.690.850 - \text{Rp. } 1.405.754.200}{\text{Rp. } 1.405.754.200} \times 100 \%$$

$$\text{TKR} = 13,59 \%$$

$$\begin{aligned} \text{Proyeksi} &= \text{Rp. } 1.590.081.250 - (13,59 \% \times \text{Rp. } 1.405.754.200) \\ &= \text{Rp. } 1.399.039.254 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Potensi terpendam} &= \text{Rp. } 1.590.081.250 - \text{Rp. } 1.399.039.254 \\ &= \text{Rp. } 191.041.996 \end{aligned}$$

$$\text{Rencana tindakan} = 50 \% \times \text{Potensi terpendam}$$

Dimana 50 % : apabila potensi dianggap bertambah untuk tahun-tahun berikutnya maka ditetapkan 50 %.

Untuk menentukan Target dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Target} = \text{Proyeksi} + \text{Rencana Tindakan}$$

Maka perhitungan untuk mencari target pada tahun 2007 :

$$\text{TKR} = \frac{\text{Rp. } 1.214.690.850 - \text{Rp. } 1.405.754.200}{\text{Rp. } 1.405.754.200} \times 100 \%$$

$$\text{TKR} = 13,59 \%$$

$$\begin{aligned} \text{Proyeksi} &= \text{Rp. } 1.590.081.250 - (13,59 \% \times \text{Rp. } 1.405.754.200) \\ &= \text{Rp. } 1.399.039.254 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Potensi terpendam} &= \text{Rp. } 1.590.081.250 - \text{Rp. } 1.399.039.254 \\ &= \text{Rp. } 191.041.996 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Rencana Tindakan} &= 50 \% \times \text{Rp. } 191.041.996 \\ &= \text{Rp. } 95.520.998 \end{aligned}$$

Target yang seharusnya ditetapkan untuk tahun 2007

$$\begin{aligned} \text{Target 2007} &= \text{Rp. } 1.399.039.254 + \text{Rp. } 95.520.998 \\ &= \text{Rp. } 1.494.560.252 \end{aligned}$$

Dalam perhitungan ini penulis menggunakan program rencana tindakan 20 % karena pertambahan potensi dianggap cenderung tetap.

$$\begin{aligned} \text{Rencana Tindakan} &= 20 \% \times \text{Rp. } 191.041.996 \\ &= \text{Rp. } 38.208.399 \end{aligned}$$

Target yang seharusnya ditetapkan untuk tahun 2007

$$\begin{aligned} \text{Target 2007} &= \text{Rp. } 1.399.039.254 + \text{Rp. } 38.208.399 \\ &= \text{Rp. } 1.437.247.653 \end{aligned}$$

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel IV.6 berikut :

Tabel IV.6
Tabel Perhitungan Penetapan Target

Uraian	Data proyeksi potensi tahun 2007	
Potensi	Rp.	1.590.081.250
Proyeksi	Rp.	1.399.039.254
Potensi terendam	Rp.	191.041.996
Rencana tindakan 20 %	Rp.	38.208.399
Target	Rp.	1.437.247.693

Sumber : Penulis (data olahan) 2007

Berdasarkan potensi penerimaan retribusi terminal pada sembilan terminal dan unit-unit terminal, maka didapat target yang seharusnya ditetapkan yaitu sebesar Rp. 1.437.247.653 untuk tahun 2007, sedangkan menurut data yang diperoleh Dinas Perhubungan target untuk tahun 2007 adalah sebesar Rp. 2.000.000.000 dengan realisasi Rp. 1.214.690.850 maka terdapat selisih target Rp. 562.752.347, dan apabila dihubungkan dengan realisasi tahun 2007 maka persentase tingkat pencapaian adalah sebesar 84,50 % artinya bahwa target yang berdasarkan perhitungan lebih mendekati tingkat pencapaiannya dibandingkan dengan target yang ditetapkan.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan : Bahwa target yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan belum realistis dari potensi yang ada, target yang didapat dari hasil analisis perhitungan mendekati tingkat persentase dari realisasi tahun 2007 sebesar 84,50 persen, dimana target yang harus ditetapkan sebesar Rp. 1.437.247.653.

B. Saran

1. Dari Kesimpulan diatas, maka diberikan saran-saran dalam rangka menetapkan target penerimaan retribusi terminal di Kota Palembang, Dinas perhubungan dalam menetapkan target harus memperhatikan potensi juga memperhatikan realisasi tahun sebelumnya serta apabila Dinas Perhubungan menaikkan target retribusi terminal sebaiknya menambahkan lagi objek-objek tempat pemungutan Retribusi Terminal agar penerimaan retribusi terminal mencapai target yang ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim. 2000. **Akuntansi Sektor Publik**. Salemba Empat, Jakarta.

Akhmad, Agus. 2006. **Analisis Potensi Retribusi Terminal di Kota Pagar** ✓

Alam. Tesis PPS Unsri : Palembang.

Animo. 2000. Undang-undang No. 34 Tahun 2000. **Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**.

Animo. Peraturan Daerah. No. 16 Tahun 1998. **Tentang Retribusi Terminal**.

Animo. Peraturan Daerah. No. 17 Tahun 2002. **Tentang Retribusi Terminal**.

Animo. Peraturan Pemerintah. No. 66 Tahun 2001. **Tentang Retribusi Daerah**.

Animo. Peraturan Pemerintah. No. 24 Tahun 2005. **Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan**.

Bastian. Indra. 2001. **Manual Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah**, BPFE. Yogyakarta.

Kunarjo. 2001. **Perencanaan dan Pembiayaan, Pembangunan**, VI-Press. Jakarta

Lin. Nan Alih Bahasa W. Gulo. 2000. **Metode Penelitian**, PT. Grasindo. Jakarta ✓

Mardiasmo. 2002. **Perpajakan, Edisi Revisi**. Penerbit Andi Yogyakarta. ✓
Yogyakarta.

↳ Mudrajat Kuncoro. 2003. **Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi**, Bumi Aksara, Jakarta. ✓

M. Iqbal Hasan. 2002, **Pokok-pokok Materi Statistik I**, Bumi Aksara, Jakarta.

Sugiyono, 2002. **Metodologi Penelitian Bisnis**. AlfaBeta. Jakarta ✓

Sabeni. Arifin dan Imam Ghozali. 2001. **Pokok-pokok Akuntansi Pemerintah**, BPFE, Yogyakarta.

Surayin. 2001. **Kamus Umum Bahasa Indonesia**. Yrama Widya : Bandung

Skripsi.

Rina. **Analisis Upaya-upaya Yang Dilakukan Untuk Meningkatkan Penerimaan Retribusi Terminal Di Kabupaten Ogan Komering Ilir.**2007. (Tidak dipublikasi)

2006. **Pedoman Pelatihan dan Bimbingan Reformasi Upaya Peningkatan PAD Bagi Aparat Pengelola Pendapatan Asli Daerah.**



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PERHUBUNGAN

Alamat : Jl. Pangeran Sido Ing Lautan 35 Ilir Telp. 442547 Palembang - 30146

Palembang, 17 Februari 2008

nomor : 551/229/DISHUB/2008
tujuan :
aspek :
: Selesai Pengambilan Data

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Plg
di -
Palembang

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang, nomor : 302/G-17/FE-UMO/XII/2007, tanggal 13 Desember 2007 hal mohon bantuan data, dengan ini diinformasikan bahwa :

Nama : FREDY ARIYANTO
NIM : 22 2003 129
Jurusan : Akuntansi

telah selesai melaksanakan survey/pengambilan data di Dinas Perhubungan Kota Palembang.

Demikian untuk dimaklumi.

A.N. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PALEMBANG
KEPALA BAGIAN TATA USAHA



MASRIFIN, SE, M.Si
Pembina Tk I
NIP. 440 019 140



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA	FREBY ARIYANTO	PEMBIMBING
N I M/NIRM	22 2003 129	KETUA : M. Orba Kurniawan, SE, SH, BKP
PROGRAM STUDI	MANAJEMEN/AKUNTANSI	ANGGOTA
JUDUL SKRIPSI	ANALISIS PENETAPAN TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI TERMINAL PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALEMBANG	

NO.	TGL/BL/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
			KETUA	ANGGOTA	
1	29/1/08	Bab I & II			partisi
2	30/1/08	Bab I & II			partisi CA
3					Bab III
4	8/2/08	Bab II + III			partisi + Ase
5	12/2/08	Bab II			Ase
6	12/2/08	Bab IV			partisi
7	13/2/08	Bab IV			partisi
8	16/2/08	Bab IV & V			partisi
9	18/2/08	Bab IV & V			partisi
10	18/2/08	Bab IV & V			Ase
11					
12					
13					
14					
15					
16					

CATATAN

Mahasiswa diberikan waktu menyelesaikan Skripsi, 6 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan

Di keluaran di : Palembang
 Pada tanggal : 22 1 011 08

Dekan
 Jurusan,

 Drs. Sunardi, SE, MS1



KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN USULAN PENELITIAN



NAMA SISWA : FREDY ARIYANTO PEMBIMBING :
 : 22 2003 129 KETUA : M. ORBA KURNIAWAN, SE. SH. BKP
 : AKUNTANSI ANGGOTA :

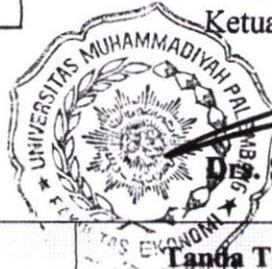
JALAN PENELITIAN : **ANALISIS PENETAPAN TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI TERMINAL PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALEMBANG**

TGL/BULAN/TAHUN	MATERI KONSULTASI	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
		KETUA	ANGGOTA	
1-08	pm Up	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	penyusunan
1-08	pm & Up	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	penyusunan
1-08	Up	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	ace

tanggal Seminar yang disepakati :

Dikeluarkan : Palembang
Pada Tgl.

a.n. Dekan
Ketua Jurusan Akuntansi



[Signature]
Drs. Sunardi, SE, M.Si

Daftar Mahasiswa Peserta Seminar
yang dibawa oleh Pemakalah

Nama Mahasiswa	NIM	Tanda Tangan
Ade Irma Heryani ALHAKMA C	22-2003-145 22 2003 140	<i>[Signature]</i>
X. Sulvan Varianda	22.2003.212	<i>[Signature]</i>
ABUNG D.V.	22 2003 218	<i>[Signature]</i>
Darman	22.2003.100	<i>[Signature]</i>
ARY AGUSTIAN	22 2003 078	<i>[Signature]</i>
Indra Andre Wiyaya	22 2003 212	<i>[Signature]</i>
AUDRI ANTONI	22 2003 084	<i>[Signature]</i>
Ahmad Primanto	22.2003.175	<i>[Signature]</i>
MUJIANTO	22 2003 079	<i>[Signature]</i>
HARI SENTOSA	22.2003.082	<i>[Signature]</i>
Melzar Saputra	22.2003.180	<i>[Signature]</i>

Usulan Penelitian di Seminasikan setelah mendapat persetujuan dari Anggota dan Ketua Pembimbing Kartu Bimbingan Skripsi akan diberikan setelah Seminar dan Perbaikan Usulan Penelitian.



Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Palembang

SERTIFIKAT

Nomor : *056/J-10/FE-UMP/T/2008*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Diberikan Kepada :

Nama : *FREDY ARIVANTO*

NIM : *22 2003 129*

Jurusan : **Akuntansi**

**Yang dinyatakan LULUS mengikuti ujian kemampuan membaca Al-Qur'an
di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang**



Palembang, *23 Zulhijah 1428 H.*
02 Januari 2008 M.



Ahmad Dekan
Pembantu Dekan IV,

[Signature]
M. Basyaruddin, S.E., Ak., M.Si

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS EKONOMI



JURUSAN

JURUSAN MANAJEMEN (S1)

JURUSAN AKUNTANSI (S1)

MANAJEMEN PEMASARAN (D III)

IZIN PENYELENGGARAAN

No 3450/D/T/2005

No 3449/D/T/2005

No 1611/D/T/2005

AKREDITASI

No 015/BAN-PT/Ak-VII/S1/VII/2003 (B)

No 020/BAN-PT/Ak-IXI/S1/X/2005 (B)

No 003/BAN-PT/Ak-IV/Dpi-III/V/2004 (B)

Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu ☎(0711) 511488 Facsimile 518018 Palembang 30263

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Hari / Tanggal : Selasa, 4 Maret 2008
Waktu : 08.00 WIB
Nama : **FREDY ARIYANTO**
NIM : 22 2003 129
Jurusan : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Pemerintahan
Judul Skripsi : **ANALISIS PENETAPAN TARGET PENERIMAAN
RETRIBUSI TERMINAL PADA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PALEMBANG**

**TELAH DIPERBAIKI DAN DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI DAN PEMBIMBING
SKRIPSI DAN D PERKENANKAN UNTUK MENGIKUTI WISUDA**

NO	NAMA DOSEN	JABATAN	TGL PERSETUJUAN	TANDA TANGAN
1.	M. Orba Kurniawan, SE. SH	Pembimbing		
2.	Drs. Sunardi, SE. M.Si	Ketua Penguji	14-04-08	
3.	Mizan, SE. M.Si	Anggota Penguji I	8/3 - 2008	
4.	M. Orba Kurniawan, SE. SH	Anggota Penguji II		

Palembang, Maret 2008
An. Dekan
Ketua Jurusan Akuntansi



Drs. Sunardi, SE. M.Si

BIODATA PENULIS

Nama : Fredy Ariyanto

NIM : 222003129

Tempat / Tanggal Lahir : Palembang, 01 Februari 1984

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Jl. Balap Sepeda Lr. Muhajirin III RT.24 RW.07
No. 1359 Palembang

Nomor Telpon / Hp : (0711) 371844

Pekerjaan : Mahasiswa

Nama Orang Tua :

1. Ayah : Darsun
2. Ibu : Samilah

Pekerjaan Orang Tua :

1. Ayah : Buruh
2. Ibu : Ibu Rumah Tangga

Alamat Orang Tua : Jl. Balap Sepeda Lr. Muhajirin III RT.24 RW.07
No. 1359 Palembang

Palembang, Februari 2008

penulis